

Wabup Sulaiman Buka Musda Persatuan Perangkat Desa Indonesia Rohil Pertama

Andy Gunawan Riothallo - ROKANHILIR.INDONESIASATU.CO.ID

Sep 9, 2021 - 19:05



ROKAN HILIR – Wakil bupati Rokan Hilir (Rohil) H.Sulaiman,SS,MH membuka musyawarah daerah (Musda) Persatuan perangkat desa Indonesia(PPD) kabupaten Rokan Hilir. Kabupaten Rokan Hilir merupakan PPD pertama di provinsi Riau. Pembukaan di laksanakan di gedung serbaguna Mlsran Rais Jalan Gedung Nasional Bagansiapiapi, Kamis (09/09/2021). Tampak hadir juga sejumlah pimpinan tinggi pratama OPD Rohil, coordinator 14 kecamatan dan camat se-Kabupaten Rokan Hilir. Musda ini dilaksanakan oleh penerima

mandataris PPDl Kabupaten Rohil untuk memilih ketua dan kepengurusan PPDl Rokan Hilir.

Wakil bupati Rokan Hilir H.Sulaiman,SS,MH se usai membuka musda PPDl yang pertama ini menjelaskan bahwa tujuan dibentuknya PPDl ini untuk memperkuat kinerja perangkat desa.

“Kita lihat hasil musda PPDl bagaimana kepengurusan dan visi misi kedepannya,”tutur wabup.



Sedangkan Ketua pelaksanan Musda Nina H. Siahaan menjelaskan bahwa dirinya mendapat mandate dari PPDl pusat pada bulan Oktober 2020. Oleh sebab itu dalam kesempatan sebelumnya yang mendapat mandate tersebut keliling di 18 kecamatan se Kabupaten Rokan Hilir sehingga mendapat 18 orang perwakilan disetiap kecamatan.

“Laporan programnya pertama yang kita tekankan disini silaturahmi antar perangkat desa. Karena merasa miris dari perangkat satu desa dengan desa lainnya bahkan tiidak saling kenal,”tutur Nina Siahaan.

Kemudian itu, lanjutnya program PPDl kedepan yakni pemberkasan atau lainnya banyak yang terlambat oleh sebab itu PPDl akan menetapkan di dalam perangkat desa sehingga dapat membantu Dinas PMD Rohil dalam pemberkasan tersebut.

“Selanjutnya akan memprioritaskan nomor induk perangkat desa (NIPD). Itu yang lagi kita perjuangkan karena di pusat sudah masuk di kemendagri. Hanya di Rokan Hilir karena SK nya belum keluar jadi seluruh perangkat desa belum bisa masuk di kemendagri. Untuk provinsi Riau PPDl Rokan Hilir yang perdana,”ucapnya.

Kata Ia, seluruh perangkat desa itu kalau gaji sudah setara dengan ASN golongan II namun legalitasnya masih belum. Oleh sebab itu NIPD ini akan mengunci perangkat desa jangan sampai setiap pergantian kepala desa juga ada pergantian perangkat desa.

“NIPD mengunci perangkat desa hingga menjalankan kinerja sesuai maksimal jabatan yang ditetapkan undang-undang nomor 83 yakni selama 5

tahun,"tuturnya. (andi)